**Pemikiran KH. Abdurrahman Wahid:**

**Pesantren Fiqh-Sufistik dan Pribumisasi Islam**

Oleh: Muh. Ilham Usman

STAIN Majene

ilhamusman@stainmajene.ac.id

**ABSTRAK**

Tulisan ini menyajikan hasil penelitian tentang pemikiran keagamaan KH. Abdurrahman Wahid dalam pesantren fiqh-sufistik dan pribumisasi Islam. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif-kualitatif dan analisa kritis dalam melihat pesantren bercorak fiqh-sufistik dan pribumisasi Islam. Hasil penelitian menemukan bahwa KH. Abdurahman Wahid – Gus Dur – jalur keilmuan pesantren terdiri dari dua gelombang, abad XIII bercorak sufistik dan abad XIX bercorak fiqh, sehingga Islam yang dihasilkan oleh pesantren adalah Islam yang lentur dan tidak kaku. Islam bercorak fiqh-sufistiklah yang menyebar dan berkembang di Indonesia yang terus digalakkan dan disebarkan oleh para penganjur dan ulama Indonesia. Atas dasar inilah, sehingga Gus Dur melakukan lompatan berpikir di zamannya dengan menggelorakan "Pribumisasi Islam".

1. **PENDAHULUAN**

Dalam tubuh Nahdlatul ‘Ulama (NU), Gus Dur termasuk pemikir muda yang melakukan gebrakan dalam peningkatan pemikiran. Hal ini dapat dilihat ketika Gus Dur melakukan beberapa diskusi berkaitan beberapa problema yang terjadi kala itu. Dengan menggalakkan beberapa diskusi inilah, para intelektual muda juga mulai melakukan halaqah, ikut ‘nimbrung’ dalam Bahsul Masa’il yang diadakan oleh pengurus NU, hingga membuat beberapa lembaga diskusi, seperti LKiS, P3M, ELSAD, dan lain sebagainya.

Maraknya halaqah-halaqah dan diskusi dalam tubuh NU lahir dari keputusan Muktamar ke-27 di Situbondo dengan mengusung tema: “kembali ke khittah 1926”. Sebuah grand tema bahwa NU menarik diri dari dunia politik praktis dan kembali menjadi organisasi sosial yang mengurusi masalah agama, dakwah, dan sosial. Adapun alasannya ke khittah 1926, sebagai berikut:

1. Sebagai organisasi keagamaan, NU telah mengalami hambatan karena kurangnya ikthiar kreatif yang sesuai dengan kebutuhan masa.
2. Karena keterlibatannya di dalam kegiatan politik praktis yang berlebihan, NU menjadi kurang peka menghadapi perkembangan sehingga tidak berjalan sesuai dengan hakikatnya sebagai organisasi keagamaan.
3. Sudah menjadi tekad NU untuk senantiasa terikat dengan perkembangan kehidupan berbangsa dan bernegara.
4. Ulama sebagai unsur utama NU menyadari keprihatinan akan perkembangan NU dan merasa perlu menegaskan pedoman dan petunjuk bagi perkembangan organisasi.[[1]](#footnote-2)

Dengan adanya ‘deklarasi’ ini, maka secara otomatis NU tidak lagi terikat dengan partai politik (PPP) dan juga menerbitkan surat edaran tentang larangan perangkapan jabatan pengurus NU dan pengurus partai politik tertentu. Dengan kembali ke khittah NU 1926, maka Muktamar 1984 menyusun program program yang menitik beratkan pada: syuriah, pendidikan, dakwah dan penerbitan, sosial, perekonomian, pertanian dan nelayan, tenaga kerja, kebudayaan, kewanitaan, kepemudaan, kaderisasi, organisasi, dan pembentukan kepribadian.

Gus Dur sebagai ketua umum PBNU yang memulai langkah dengan mengikuti khittah 1926 tak bisa dipungkiri. Penulis, menganggap bahwa hampir semua pemikiran yang dilontarkan pada tahun 1984 dan naiknya KH. Hasyim Muzadi sebagai pengganti dapat dilihat sebagai pemikiran dalam lingkar kembali khittah NU 1926.

**Metode Penelitian**

Adapun pendekatan yang digunakan dalam peneulisan ini adalah pendekatan normatif dengan melihat deskripsi normatif konsep pembelaan tradisi dan pembaruan pesantren KH. Abdurrahman Wahid. Dan bentuk penelitian yakni kepustakaan-normatif yang bertumpu pada karya-karya ilmiah KH. Abdurrahman Wahid. Sedangkan tipe penelitian yang digunakan oleh penulis adalah deskriptif-kualitatif dan analisa kritis dengan cara menguraikan secara faktual dan kritis tentang konsep pembelaan tradisi dan pembaruan pesantren KH. Abdurrahman Wahid.

**II. PEMBAHASAN**

1. **Biografi KH. Abdurrahman Wahid**

 Abdurahman Wahid dengan nama lengkap Abdurrahman ad-Dakhil (yang akrab disapa Gus Dur), lahir pada tanggal 4 Agustus 1940. Akan tetapi, perlu diketahui bahwa tanggal itu menurut kalender Islam, yakni bahwa Gus Dur dilahirkan pada bulan Sya’ban, bulan kedelapan dalam Islam. Jadi sebenarnya, tanggal 4 Sya’ban 1940 adalah tanggal 7 September. Gus Dur dilahirkan di Jawa Timur, kota Jombang tepatnya daerah Denanyar, di pondok pesantren milik kakek dari pihak ibunya, Kiai Bisri Syamsuri.[[2]](#footnote-3)

 Gus Dur memulai pendidikan dasarnya di Sekolah Dasar KRIS di Jakarta pusat, namun tidak selesai. Akan tetapi, ia kemudian pindah ke Sekolah Dasar Mataram Perwari, Jakarta pusat. Pada tahun 1954, setahun setelah ia menamatkan sekolah dasar dan memulai Sekolah Menengah Ekonomi Pertama (SMEP) di Yogyakarta. Menurut, Greg Barton, pada tahap ini, pendidikan Gus Dur sepenuhnya bersifat sekuler, namun tentu saja ia telah mempelajari bahasa Arab.[[3]](#footnote-4)

 Setelah terdaftar sebagai siswa di SMEP, Yogyakarta, ia juga belajar di Pesantren al-Munawwir di Krapyak tiga kali seminggu. Di sini, ia belajar bahasa Arab kepada Kiai Ali Ma’shum.[[4]](#footnote-5)Masa ini juga, ia telah banyak membaca buku-buku berat, seperti *What Is to Be Done?* Karya Lenin dan *Das Capital* sebagai magnun opus-nya Karl Marx serta banyak memahami tulisan-tulisan Plato dan Aristoteles.[[5]](#footnote-6)

 Selama Gus Dur menimba ilmu di dunia pesantren, ia tidak hanya bergulat dengan berbagai pemikir-pemikir sosial-kritik *ala* Barat, namun ia juga banyak belajar tentang studi Islam sebagai identitas pendidikan pesantren. Tapi yang paling menarik dari diri Gus Dur, ia mampu menggabungkan kedua khazanah keilmuan tersebut tanpa mendikotomikannya.

 Di pesantren, ia juga banyak bergelut dan bersentuhan dengan seni dan kebudayaaan, seperti seni pertunjukan pewayangan, nonton film, dan banyak membaca buku-buku sastra, khususnya sastra picisan. Ia juga lebih banyak menyukai cerita-cerita pendekar silat asal Cina, karena didalamnya banyak mengandung unsur moral dan falsafah hidup Cina yang kemudian mempengaruhi cara berpikirnya. Dalam cerita silat katanya, ia melihat kesetiaan kepada seorang guru dan tindakan mengejar kebajikan sering kali mengalami banyak cobaan, namun pada akhirnya menuai kemenangan. Sedangkan di pesantren, kesetiaan dan rasa hormat kepada kiai merupakan hal yang paling penting. Sebagai seorang remaja, Gus Dur juga tertarik pada kisah-kisah yang berkaitan dengan Perang Dunia II. Ia juga gemar sekali membaca biografi presiden-presiden Amerika.[[6]](#footnote-7)

 Setelah menamatkan pendidikan di pondok pesantren, tepatnya tahun 1964, Gus Dur melanjutkan studinya di Universitas al-Azhar, Cairo, Mesir. Di sana, ia tidak sempat selesai karena suasana yang kurang kondusif. Katanya, di Universitas al-Azhar ia tidak mendapatkan banyak hal baru, khususnya ilmu pengetahuan yang tidak didapatkan di dunia pesantren. sehingga praktis selama dua tahun di sana, ia banyak menghabiskan waktunya di perpustakaan nasional Mesir dan perpustakaan kedutaan Amerika dan Prancis. Di samping juga aktif dalam berbagai forum kajian. Ia juga sering mengadakan pertemuan oleh sejumlah pemikir Mesir terkemuka, misalnya Zakki Naguib Mahmoud, Soheir al-Qalamawi, dan Syauqi Deif.[[7]](#footnote-8)

 Pada pertengahan tahun 1970-an, Gus Dur menyelesaikan studi empat tahunnya di Baghdad dan ia pun pindah ke Eropa. Mula-mula, ia tinggal di Belanda untuk mendapatkan kesempatan melanjutkan studinya. Namun, Universitas Baghdad tidak memperoleh pengakuan di universitas-universitas Eropa. Sehingga ia pun lebih memilih berkelana selama satu tahun di Eropa untuk mencari ilmu pengetahuan, mulai dari Belanda pindah ke Jerman dan kemudian tinggal di Prancis dan akhirnya kembali ke Tanah Air.[[8]](#footnote-9)

 Setelah Gus Dur selesai dalam pengembaraan intelektualnya di negara-negara luar ia pun kembali ke Indonesia. Pada tahun 1984, bersama dengan Kiai Achmad Shiddiq, terpilih sebagai Ketua Tanfidziyah dan Syuriah PBNU pada muktamar NU di Situbondo. Posisi ini bertahan sampai dipilih kembali pada muktamar di Yogyakarta tahun 1989. Pada muktamar di Cipasung tahun 1994, kedudukan Gus Dur masih kuat dan tetap dipercaya memimpin organisasi massa terbesar di Indonesia ini bersama dengan Kiai Ilyas Ruchiyat. Di luar NU, ia banyak aktif di organisasi yang dibentuknya, Forum Demokrasi (Fordem).[[9]](#footnote-10)

 Selama Gus Dur menahkodai kedua organisasi besar ini, NU dan Fordem, ia selalu menampakkan gagasan pemikirannya yang dianggap banyak kalangan kontroversial dan *nyeleneh.[[10]](#footnote-11)* Di internal NU, Gus Dur mengembalikan hakikat dan menjadikan organisasi besar ini menjadi organisasi sosial-keagamaan yang punya visi-misi untuk membumikan Islam rahmatan lil alamin dan penguatan *civil society.* Sedangkan di Fordem, Gus Dur selalu merepresentasikan dirinya sebagai tokoh oposan terhadap kekuasaan orde baru, Soeharto, yang dianggap mengebiri nilai-nilai demokrasi dan hak asasi manusia. Sebenarnya kedua organisasi ini membuat Gus Dur mampu memadukan konsep Islam rahmatan lil alamin dengan konsep demokrasi, karena menurutnya, kedua konsep ini sama-sama memiliki nilai untuk tidak mengajarkan tindakan dan perlakuan diskriminasi terhadap umat manusia. Oleh karena itu, Gus Dur begitu keras memperjuangkan demokrasi subtansial di Indonesia, karena menurutnya, pluralisme akan terjaga kalau ada demokrasi.

 Hasil pemikirannya banyak tertuang dalam bentuk artikel yang dipublikasikan diberbagai media, mulai dari gagasan keIslamannya sampai pada gagasan kebangsaan dan politik. Dalam pemikiran keislamnya yang terkenal dan banyak digandrungi oleh kalangan anak muda NU saat ini, seperti Islam pribumi, konsep keislaman yang menyatu dengan kebutuhan-kebutuhan ke Indonesiaan yang menyangkut tentang bebagai ekspresi tradisi dan budaya di Indonesia.

 Sebagai tokoh reformis bersama dengan Amin Rais, Megawati, dan Sultan Hamengkubuwono X. Pada tahun 1998, Gus Dur melakukan gerakan perlawanan terhadap kekuasaan Orde Baru, yang akhirnya Soeharto lengser dari kursi kepresidenan. Pada masa transisi tersebut, Gus Dur banyak melakukan manuver politik dengan upaya mengawal reformasi yang baru seumur jagung itu. Salah satu upaya Gus Dur adalah membentuk partai politik PKB sebagai wadah untuk menduduki kursi kepresidenan. Setelah Habibiemenggantikan Soeharto, tahun 1999-2001 Gus Dur kemudian terpilih menjadi presiden ke-4 RI.

 Selama Gus Dur menjadi presiden, ia banyak mengeluarkan kebijakan-kebijakan reformis yang tidak terpikirkan oleh kebanyakan orang. Salah satu kebijakannya adalah menghapus TAP MPRS tentang pelarangan ideologi Komunisme dan Leninisme di Indonesia. Menjadikan agama Konghucu sebagai agama resmi negara, dan membubarkan Departemen Sosial, yang dianggap, banyak melakukan korupsi serta membentuk Departemen Kelautan dan Departemen Kehutanan.

 Di tingkat Internasional, Gus Dur pernah menjadi ketua WCRP (*World Conference for Religion and Peace)* dan beberapa penghargaan yang diterimanya antara lain Doktor Honoris Causa dari Universitas Jawaharlal Nehru, India, Doktor Honoris Causa Bidang Perdamaian dari Soka University Jepang, tahun 2000, Global Tolerance Award dari Friends of the United Nations, New Work, tahun 2003, World Peace Prize Award dari World Peace Prize Awarding Council (WPPAC), Seoul, Korea Selatan, tahun 2003, serta Presiden World Headquarters on Non-Violence Peace Movement, tahun 2003.[[11]](#footnote-12)

 Selama hidupnya, karena kesehatan fisiknya yang tidak memungkinkan, Gus Dur beberapa kali melakukan pemeriksaan. Pada tahun 2009, ia selalu keluar masuk rumah sakit sehingga akhir 2009, tepatnya 30 Desember, pukul 18.45 WIB, di Rumah Sakit Mangunkusumo, Jakarta, Gus Dur meninggal dunia.

1. **Beberapa Gagasan KH. Abdurrahman Wahid**
2. **Pesantren Fiqh Sufistik**

Sebagian besar para pakar pendidikan Indonesia mengatakan bahwa pesantren merupakan lembaga pendidikan tertua di negeri ini. Pendefinisian pesantren sangat banyak dan beragam, di antaranya pesantren berasal dari kata “santri” yang dapat diartikan tempat santri. Kata santri berasal bahasa Sansakerta, yakni “cantrik” berarti orang yang selalu mengikuti pendidik, yang kemudian dikembangkan oleh perpendidikan Taman Siswa dalam sistem asrama yang disebut Pawiyatan. Istilah *santri* juga dapat dilacak dalam bahasa [Tamil](http://id.wikipedia.org/wiki/Tamil), yang berarti pendidik mengaji.[[12]](#footnote-13)

Sedangkan [C. C Berg](http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=C._C_Berg&action=edit&redlink=1) berpendapat bahwa istilah tersebut berasal dari istilah *shastri*, yang dalam bahasa India berarti orang yang tahu buku-buku suci agama Hindu atau seorang sarjana ahli kitab suci agama [Hindu](http://id.wikipedia.org/wiki/Hindu). Istilah yang terakhir ini, mempunyai keidentikkan dengan istilah *pesantren* berasal dari kata pe-*santri*-an, dimana kata "santri" berarti murid dalam [bahasa Jawa](http://id.wikipedia.org/wiki/Bahasa_Jawa), di mana seseorang dipisahkan dari orang tua dan keluarga mereka adalah agar mereka belajar hidup mandiri dan sekaligus dapat meningkatkan hubungan dengan kyai dan juga [Tuhan](http://id.wikipedia.org/wiki/Tuhan). Di sisi lain, ada juga pemaknaan lain kata “santri”, yang dianggap sebagai gabungan kata *saint* (manusia baik) dengan suku kata *tra* (suka menolong), sehingga kata pesantren dapat berarti tempat pendidikan manusia baik-baik.[[13]](#footnote-14)

Dulu, pesantren diawali dengan adanya seseorang yang memiliki kapasitas dan kapabilitas keilmuan agama, sehingga masyarakat datang menyapa sekaligus bertanya pelbagai persoalan agama dan sosial-budaya, hingga akhirnya hampir setiap masalah dapat dicarikan solusinya. Masyarakat pun datang berduyun-duyun dan pesantren mampu melakukan *problem solving* atas masalah yang dihadapi oleh masyarakat.[[14]](#footnote-15) Dengan demikian, pesantren dijadikan oleh masyarakat sekitar sebagai referensi dalam bertanya dan menyelesaikan persoalan yang melilit kehidupannya, khususnya masalah sosial-religi (spiritualitas).

Pesantren merupakan kultur yang unik, dengan keunikan itulah maka pesantren adalah subkultur dari masyarakat Indonesia.[[15]](#footnote-16) Pernyataan Gus Dur tentang keunikan pesantren didasari pada tiga elemen yang menjadikannya sebagai subkultur, yakn pola kepemimpinan di dalamnya yang berada di luar kepemimpinan pemerintahan desa, literatur universalnya yang terus dipelihara selama berabad-abad, dan sistem nilainya sendiri yang terpisah dari yang diikuti oleh masyarakat luas.

Begitu pula keunikan pesantren dapat ditinjau dari segi sumber tradisi keilmuan Islam yang bersumber pada dua gelombang: *pertama,* gelombang pengetahuan keislaman yang datang pada abad ke-13 Masehi bersamaan dengan masuknya Islam ke kawasan ini. Pada abad ini, Islam datang ke Nusantara sudah dalam bentuk yang telah dikembangkan di Persia dan anak benua India yang cenderung ke tasawuf.[[16]](#footnote-17) Pada masa ini pulalah, terlihat beberapa kitab klasik yang cenderung fiqh-sufistik yang diajarkan, seperti kitab *Bidayah al-Hidayah* dan kitab *Ihya Ulumuddin* karangan Imam Al-Ghazali, serta *Syarh Hikam* karya Ibn 'Athaillah Askandary. *Kedua,* gelombang ketika para ulama kawasan nusantara menggali ilmu di Semenanjung Arabia, khususnya di Mekkah dan kembali mendirikan pesantren-pesantren besar dan membawakan orientasi baru pada manifestasi keilmuan fiqh secara tuntas dan mendalam.[[17]](#footnote-18) Hal ini bisa dilihat dari kitab-kitab yang dihasilkan oleh mereka sekembalinya dari Mekkah dan Timur Tengah, seperti kitab *Sabilal Muhtadin* *li Tafaqquh fi 'Amridin* karya Syekh Arsyad al-Banjari atau Datuk Kalampayan. Kitab *Nur az-Zalam* karya Syekh Nawawi al-Bantani sebagai kitab penjelasan atas *Manzhumat 'Aqidatil al-'Awwam*. Kitab *Hidayah al-Salikin fi Suluk Maslak al-Muttaqin* dan kitab *Sair as-Salikin ila Rabb al-Alamin* karya Syekh Shamad Al-Palimbani. Kitab *Nuzhat al-Alibba fith Thabaqat al-Udaba* karya Syekh Hasyim Asy'ari. Ini Berdasarkan sejarah gelombang masuknya tradisi keilmuan di pesantren, maka pesantren banyak bercorak fiqh-sufistik. Corak inilah yang sebagian besar mewarnai perkembangan dan penyebaran agama Islam di Indonesia.

Menurut Mahmud Arif dalam bukunya *Pendidikan Islam Transformatif* menulis bahwa sejak masa keemasan Islam, pendidikan Islam dapat dipetakan dalam dua arus utama aliran, yakni aliran konservatif dan aliran rasional. Aliran konservatif (*al-Muhafizh*) adalah aliran pendidikan Islam yang mempunyai kecenderungan “keagamaan” sangat kuat dengan ciri-cirinya hanya memaknai ilmu terbatas pada pengetahuan tentang Tuhan, berambisi pada keluhuran spiritual hingga bersikap “mengecilkan” dunia, dan menganggap ilmu hanya untuk ilmu. Titik ujungnya hanya dimaknai sebagai pewarisan budaya.

Sedangkan aliran rasional adalah aliran yang berusaha mengaktualisasikan potensi-potensi (*natiqah*, *ghadhabiyyah*, dan *shahwatiyyah)* yang dimiliki individu sehingga esensi pendidikan adalah kiat transformasi ragam potensi menjadi kemampuan aktual, antara lain *hikmah* (kemampuan mengetahui, berpikir, menalar dan memilah), *‘iffah* (kemampuan mengendalikan keinginan sesuai dengan pertimbangan akal sehat), *shaja’ah* (kemampuan mengarahkan semangat/keberanian selaras pertimbangan akal sehat) dan *‘adalah* (kemampuan menyeimbangkan antar berbagai potensi diri). Dengan pelbagai potensi ini dapat menjadikan manusia yang terdidik dengan pendidikan Islam mempunyai pola pikir dan cara pandang yang kritis-transformatif dan kritis-praksis terhadap globalisasi. Salah satunya adalah kelompok Ikhwan as-Shafa sebagai pelopor pendidikan Islam kritis-transformatif, melihat bahwa pendidikan Islam tidak hanya berkutat pada pembinaan moral personal semata, akan tetapi juga mesti diarahkan pada pembinaan moral sosial. Dengan moral sosial inilah dapat dijadikan sebagai agenda dalam melakukan transformasi sosial terhadap masyarakat dengan problema sosial yang dihadapinya masing-masing.

Sedangkan menurut K.H. Said Aqil Siradj bahwa pesantren memberikan peranan penting dalam memajukan umat Islam, yakni sebagai berikut:[[18]](#footnote-19)

1. *At-Ta’lim*, yakni proses transformasi ilmu pengetahuan. Proses interaksi keilmuan yang lebih mengedepankan kualitas dan menyeimbangkan antara fisik-metafisik, rasional-irasional, dan subtantif-formalistik.
2. *Al-Tadris,* pendidikan yang mampu menumbuhkan transformasi ilmu pengetahuan dengan berlandaskan pada totalitas pengalaman keilmuan. Proses pendidikan yang meliputi teori dan praktik.
3. *Al-Ta’dib.* Prosespendidikan yang mampu memberi ruang secara luas bagi proses kesadaran berbudaya, beradab dan menjunjung tinggi etika.
4. *Al-Tarbiyah.* Proses pendidikan yang menyerukan untuk berpegang teguh pada prinsip pengakuan bahwa Tuhan adalah penguasa alam semesta.

Dengan demikian, Islam yang datang dan berkembang di Indonesia adalah Islam yang lentur, tidak fiqh *an sich*, tidak hitam-putih. Islam yang berkembang di Indonesia merupakan Islam yang mengakomodasi dan merekonsiliasi kebudayaan yang telah lama hadir di Nusantara ini.

1. **Pribumisasi Islam**

Akomodasi dan rekonsiliasi Islam terhadap tradisi atau budaya -dalam bahasa Gus Dur- adalah *pribumisasi Islam*. Lebih lanjut, Abdurrahman Wahid mengemukakan bahwa pribumisasi adalah upaya melakukan rekonsiliasi dengan kekuatan-kekuatan budaya setempat, agar budaya itu tidak hilang. Di sini pribumisasi dilihat sebagai kebutuhan, bukannya sebagai upaya menghindari polarisasi antara agama dan budaya setempat. Pribumisasi juga bukan sebuah upaya mensubordinasikan Islam dengan budaya lokal.[[19]](#footnote-20) Ia tidak sependapat jika proses islamisasi di Indonesia diarahkan atau dilihat sebagai proses Arabisasi. Bahaya dari proses Arabisasi atau proses mengidentifikasikan diri dengan budaya Timur Tengah adalah tercabutnya kita dari akar budaya kita sendiri.[[20]](#footnote-21) Lebih dari itu, Arabisasi belum tentu cocok dengan kebutuhan bangsa Indonesia.

Banyak para pemikir Islam Indonesia melakukan kritik terhadap pemikiran Gus Dur dengan menganggap bahwa apa yang ditawarkan oleh Gus Dur tak lain dari sinkretisme. Tetapi, Gus Dur sendiri menampik akan hal itu, ia menjelaskan bahwa pribumisasi Islam bukanlah dimaksudkan sebagai “jawanisasi” atau “sinkretisme”. Sebab pribumisasi Islam hanya mempertimbangkan kebutuhan-kebutuhan lokal dalam merumuskan hukum-hukum agama, tanpa merubah hukum itu sendiri. Juga bukannya meninggalkan norma demi budaya.

Pribumisasi Islam bukanlah jawanisasi/ sinkretisme, sebab pribumisasi Islam hanya mempertimbangkan kebutuhan-kebutuhan lokal di dalam merumuskan hukum-hukum agama, tanpa mengubah hukum itu sendiri. Juga bukannya upaya meninggalkan norma demi budaya, tetapi agar norma-norma itu menampung kebutuhan-kebutuhan dari budaya dengan mempergunakan peluang yang disediakan oleh variasi pemahaman nash, dengan tetap memberikan peranan kepada *Ushul Fiqh* dan *Qaidah Fiqh*. Sedangkan sinkreitisme adalah usaha memadukan teologia atau system kepercayaan lama tentang sekian banyak hal yang diyakini sebagai kekuatan gaib berikut dimensi eskatologisnya dengan Islam, yang lalu membuat bentuk panteisme.[[21]](#footnote-22)

Gagasan pribumisasi Islam didasarkan pada postulat bahwa berdirinya negara Indonesia, lebih disebabkan oleh adanya kesadaran berbangsa, bukan hanya sekedar karena faktor ideologi Islam. Oleh karena itu, Gus Dur berpendapat bahwa ajaran Islam sebagai komponen yang membentuk dan mengisi kehidupan bermasyarakat warga negara Indonesia, seharusnya diperankan sebagai faktor komplementer bagi komponen-komponen lain. Dengan demikian, tidak akan berfungsi sebagai faktor tandingan yang akan berfungsi disintegratif terhadap kehidupan berbangsa secara keseluruhan.

 Gagasan pribumisasi Islam mengingatkan mengenai perlunya kaum muslim untuk mempertimbangkan situasi-situasi lokal dalam rangka dalam penerapan ajaran-ajaran Islam. Maka, diharapkan bahwa Islam (Indonesia) tidak tercabut dari konteks lokalnya sendiri (yakni kebudayaan, tradisi, dan lainnya). Agenda ini mengharuskan dipahaminya ajaran-ajaran Islam sedemikian rupa sehingga faktor-faktor kontekstualnya dipertimbangkan sungguh-sungguh. Dalam bentuknya yang paling sederhana, hal ini mencakup kebutuhan untuk memanfaatkan istilah-istilah lokal.

Pencarian pemahaman yang menyatu dalam Islam, mengenai seluruh aspek kehidupan. Dengan sendirinya lalu muncul suatu dambaan akan pemilihan posisi dan kekuatan, kebutuhan akan penyatuan pandangan itu akhirnya menampilkan diri dalam kecenderungan sangat kuat untuk menyeragamkan pandangan. Dengan demikian tampillah sosok tubuh baru “formalisme Islam”.

Yang dipribumikan adalah manifestasi kehidupan Islam belaka. Bukan ajaran yang menyangkut inti keimanan dan peribadatan formalnya. Tidak diperlukan ‘Qur’an Batak dan Hadis Jawa’. Islam tetap Islam di mana saja berada. Namun tidak berarti semua harus disamakan ‘bentuk luar’nya. Salahkah kalau Islam ‘dipribumikan’, sebagai manifestasi kehidupan?[[22]](#footnote-23)

Namun demikian, Abdurrahman Wahid juga menyatakan perlunya hal ini dilakukan secara hati-hati. Dalam pandangannya, mengenai proses pribumisasi, pencampuran antara Islam dan kebudayaan lokal harus benar-benar dikontrol sedemikian rupa sehingga yang bersifat setempat itu tidak merusak ciri khas Islam. Terlepas dari kenyataan bahwa Islam harus dipahami secara kontekstual, bagaimanapun ciri-ciri Islam yang utama dipertahankan dalam bentuknya yang asli (misalnya, membaca Alquran ketika menjalankan praktik-praktik ritual seperti shalat).

Akan tetapi, Gus Dur hanya sampai pada gagasan ‘merubah’ yang berkaitan dengan muamalah, belum sampai pada perubahan ibadah ritual seperti yang ditawarkan oleh KH. Masdar F. Mas’udi yang perlunya meninjau ulang berkaitan dengan waktunya haji selain bulan Zulqaidah-Zulhijjah.

**Penutup**

Hasil pemaparan di atas, dapat ditarik benang merah bahwa gagasan Gus Dur dalam pemikiran Islam mendapat perhatian yang serius dari masyarakat. Di antara pemikiran tersebut yakni *pertama,* corak keilmua pesantren. Pesantren dengan corak fiqh-sufistik dapat menjadi agen moderasi dalam mewujudkan keutuhan NKRI. *Kedua*, pribumisasi Islam. Pribumisasi Islam menurut Gus Dur ini nampaknya dimaksudkan sebagai upaya agar umat Islam Indonesia dapat menerima kesadaran dan wawasan kebangsaan sebagai realitas, dan tidak perlu dipertentangkan, karena Indonesia sebagai suatu *nation* mempunyai pluralitas sosio-historis yang berbeda dengan asal muasal sosial *(social origin)* kelahiran dan keberadaan Islam dari tempat aslinya (Saudi Arabia). Ia tidak sependapat jika proses islamisasi di Indonesia diarahkan atau dilihat sebagai proses Arabisasi.

**Daftar Pustaka**

Azis, Ahmad Amir. *Neo-Modernisme Islam di Indonesia: Gagasan Sentral Nurcholis Madjid dan Abdurrahman Wahid*, Jakarta: Rineka Cipta, 1999.

Barton, Greg. *Biografi Gus Dur: The Authorized Biography of Abdurrahman Wahid*, Yogyakarta: LKiS, 2008.

Cahyono, Imam. *Membumikan Pluralisme Agama.*[*www.Freelists.org/.../ppiindia-membumikan*](http://www.Freelists.org/.../ppiindia-membumikan) *pluralisme agama*, 2010.

Choirie, A. Effendi, ed, et al., *Sejuta Gelar Untuk Gus Dur*, Jakarta: PB IKA-PMII dan Pensil-324, 2010.

Husin Al Munawar, Said Agil, *Fikih Hubungan Antar Agama*, Ciputat: Ciputat Press, 2005.

Hefner W. Robert. *Civil Islam: Muslims and demokratization in Indonesia*, terj. Ahmad Baso dengan *Civil Islam: Islam dan Demokratisasi di Indonesia*, Yogyakarta: LKiS, 2001.

Hidayat, Komaruddin dan AF, Ahmad Gaus, ed., *Passing Over: Melintasi Batas Agama*, Jakarta: Gramedia, 2001.

Ma’arif, Ahmad Syafii. *Indonesia di Simpang Jalan*, Bandung: Mizan, 1998.

*\_\_\_\_\_\_\_, Islam Dalam Bingkai Keindonesiaan dan Kemanusiaan*, Bandung: Mizan, 2009.

Misrawi, Zuhairi. *et al.,Khutbah-khutbah Toleransi*. Ciputat: Moderate Muslim Society, 2010.

Parera, Frans M. dan Koekerits, T. Jakob. *Gus Dur Menjawab Perubahan Jaman: Warisan Pemikiran KH. Abdurrahman Wahid*, Jakarta: Kompas, 2010.

Rahmat, Imdadun. *Islam Pribumi: Mendialogkan Agama Membaca Realitas*. Jakarta: Erlangga, 2003.

Siregar, Kalimuddin. *Menghindari Kekerasan, Menebar Kasih Sayang*, Jakarta: Buletin Jum’at Al-Hanif, 2009.

Suaedy, Ahmad. *Perspektif Pesantren: Islam Indonesia Gerakan Sosial Baru Demokratisasi*, Jakarta: The Wahid Institute, 2009.

Subkhan, Imam. *Hiruk-Pikuk Wacana Pluralisme di Yogya*, Yogyakarta: Kanisius, 2007.

Taher,Tarmizi. *Perkokoh Kultur Kebersamaan Dengan Agama*, Makassar: Artikel Opini Fajar, 2008.

Wahid, Abdurrahman. *Pergulatan Negara, Agama dan Kebudayaan*, Jakarta: Desantara, 2001.

\_\_\_\_\_\_, *Islamku, Islam Anda, Islam Kita: Agama Masyarakat Negara Demokrasi*, Jakarta: The Wahid Institute, 2006.

*\_\_\_\_\_\_, Islam Kosmopolitan: Nilai-Nilai Indonesia dan Transformasi Kebudayaan*, Jakarta: The Wahid Institute, 2007.

*\_\_\_\_\_\_, Ilusi Negara Islam: Ekspansi Gerakan Islam Transnasional di Indonesia*, Jakarta: The Wahid Institute, Ma’arif Institute, dan Gerakan Bhinneka Tunggal Ika, 2009.

\_\_\_\_\_\_, *Gus Dur: Menjawab Perubahan Zaman*, Jakarta: Kompas, 2010.

\_\_\_\_\_\_\_, *et al.,Islam Tanpa Kekerasan*, Yogyakarta: LKiS, 2010.

1. Einar Martahan Sitompul, NU dan Pancasila (Yogyakarta: LKiS, 2010), h. 196. [↑](#footnote-ref-2)
2. Greg Barton, *Biografi Gus Dur, The Authorized Biography of Abdurraman Wahid,* Cet. VIII; (Yogyakarta: LKiS, 2008), h. 25-26. [↑](#footnote-ref-3)
3. Greg Barton, *Biografi Gus Dur, The Authorized Biography of Abdurraman Wahid,* Cet. VIII; (Yogyakarta: LKiS, 2008), h.49. [↑](#footnote-ref-4)
4. Greg Barton, *Biografi Gus Dur, The Authorized Biography of Abdurraman Wahid,* Cet. VIII; (Yogyakarta: LKiS, 2008), h. 51. [↑](#footnote-ref-5)
5. Ahmad Amir Aziz, *Neo-Modernisme Islam di Indonesia: Gagasan Sentral Nurcholish Madjid dan Abdurrahman Wahid* (Jakarta: Rineka Cipta, 1999), h. 29. [↑](#footnote-ref-6)
6. Greg Barton, *Biografi Gus Dur, The Authorized Biography of Abdurraman Wahid,* Cet. VIII; (Yogyakarta: LKiS, 2008), h. 55. [↑](#footnote-ref-7)
7. Ahmad Amir Aziz, *Neo-Modernisme Islam di Indonesia: Gagasan Sentral Nurcholish Madjid dan Abdurrahman Wahid* (Jakarta: Rineka Cipta, 1999), h. 30. [↑](#footnote-ref-8)
8. Greg Barton, *Biografi Gus Dur, The Authorized Biography of Abdurraman Wahid,* Cet. VIII; (Yogyakarta: LKiS, 2008), h. 112. [↑](#footnote-ref-9)
9. Ahmad Amir Aziz, *Neo-Modernisme Islam di Indonesia: Gagasan Sentral Nurcholish Madjid dan Abdurrahman Wahid* (Jakarta: Rineka Cipta, 1999), h. 30-31. [↑](#footnote-ref-10)
10. Robert W. Hefner, *Civil Islam: Muslims and Democratization in Indonesia, terj.* Ahmad Baso, *Civil Islam: Islam dan Demokratisasi di Indonesia,* (Cet. I; Yogyakarta: LKiS, 2001), hal. 271-277. [↑](#footnote-ref-11)
11. Abdurrahman Wahid, *Gus Dur Menjawab Perubahan Zaman,* peny. Frans M. Parera, T. Jakob Koekerits (Jakarta: Kompas, 2010), hal. 182. [↑](#footnote-ref-12)
12. Pesantren awalnya lahir pada abad ke-11 di era Dharmawangsa dari kerajaan Dhoho, Kediri mendirikan padepokan untuk mengumpulkan para cantrik dalam memahami kitab-kitab Hindu. Lihat Said Aqil Siradj, *Teks Pesantren Tentang Pendidikan Kebangsaan* dalam Jurnal Edukasi: Jurnal Penelitian Pendidikan Agama dan Keagamaan, Vol. 5 Nomor 2, 2007. [↑](#footnote-ref-13)
13. Said Aqil Siradj, *Teks Pesantren Tentang Pendidikan Kebangsaan* dalam Jurnal Edukasi: Jurnal Penelitian Pendidikan Agama dan Keagamaan, Vol. 5 Nomor 2, 2007. [↑](#footnote-ref-14)
14. Said Aqil Siradj, *Teks Pesantren Tentang Pendidikan Kebangsaan* dalam Jurnal Edukasi: Jurnal Penelitian Pendidikan Agama dan Keagamaan, Vol. 5 Nomor 2, 2007. [↑](#footnote-ref-15)
15. Abdurahman Wahid, *Islam Kosmopolitan: Nilai-nilai Indonesia dan Transformasi Kebudayaan* (Jakarta: wahid Institute, 2007), h. 136-137. [↑](#footnote-ref-16)
16. Abdurrahman Wahid, *Asal-Usul Tradisi Keilmuan di Pesantren* dalam buku Menggerakkan Tradisi (Cet. III, Yogyakarta: LKiS, 2000), h. 221-222. [↑](#footnote-ref-17)
17. Abdurahman Wahid, *Islam Kosmopolitan: Nilai-nilai Indonesia dan Transformasi Kebudayaan* (Jakarta: wahid Institute, 2007), h. 127-128. Lihat juga Abdurrahman Wahid, *Asal-Usul Tradisi Keilmuan di Pesantren* dalam buku Menggerakkan Tradisi (Cet. III, Yogyakarta: LKiS, 2000), h. 225. [↑](#footnote-ref-18)
18. Said Aqil Siradj, *Teks Pesantren Tentang Pendidikan Kebangsaan* dalam Jurnal Edukasi: Jurnal Penelitian Pendidikan Agama dan Keagamaan, Vol. 5 Nomor 2, 2007, h. 49. Lihat juga Tasawuf sebagai Kritik Sosial [↑](#footnote-ref-19)
19. Abdurrahman Wahid, *Pergulatan Negara, Agama, dan Kebudayaan* (Jakarta: Desantara, 2001), h. 160. [↑](#footnote-ref-20)
20. Abdurrahman Wahid, *Pergulatan Negara, Agama, dan Kebudayaan* (Jakarta: Desantara, 2001), h. 160. [↑](#footnote-ref-21)
21. Abdurrahman Wahid, *Pergulatan Negara, Agama, dan Kebudayaan* (Jakarta: Desantara, 2001), h. 111. [↑](#footnote-ref-22)
22. Abdurrahman Wahid, *Tuhan Tidak Perlu Di Bela* (Yogyakarta: LKiS, 1999), h. 92. [↑](#footnote-ref-23)